

Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Di Indonesia

I Wayan Kandia
Institute Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saraswati
kandaiwayan@yahoo.com

Abstrak

Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sudah lama diimplementasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tetapi tidak semua orang mengetahui dan memahami bagaimana perjalanan PKn sepanjang berdirinya Indonesia. Padahal dengan mengetahui sejarah PKn dalam kurikulum di Indonesia, pengambil kebijakan dapat menganalisis berbagai kelemahan sebelumnya. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan PKn dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, pengambil kebijakan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah perjalanan PKn dalam kurikulum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sejarah perjalanan PKn dalam kurikulum di Indonesia dapat diketahui dari kurikulum yang berlaku di Indonesia mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 dan 2013. Kemudian pada tahun 2020 muncul perubahan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum merdeka dengan platform merdeka belajar.

Kata Kunci: Sejarah; Pendidikan Kewarganegaraan; Kurikulum; Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Untuk membentuk warga negara dengan karakter yang baik (*good citizens*), pendidikan memiliki peran yang strategis dan fundamental (Kapoh et al., 2023). Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, bahwa sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (Batubara &

Darmawan, 2017).

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan (Santika, 2021b). Salah satu kebijakan yang mengarahkan dalam upaya pencapaian tersebut adalah dengan memasukan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai kurikulum wajib mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. PKn di era ini mengemban misi untuk membentuk peserta didik menjadi warga yang religius, cerdas, terampil dan berwatak demokratis guna mewujudkan bangsa dan negara yang bermartabat (Nurdin, 2016).

PKn diperlukan agar masyarakat Bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air serta memiliki watak, sifat dan karakter

yang sesuai dengan nilai Pancasila (Santika, Kartika, et al., 2019). Karena itulah tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah membekali masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik dengan negara ataupun sesama manusia (Santika & Sudiana, 2021).

Begitu pentingnya peran PKn dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak mengherankan sejak era kemerdekaan hingga kini PKn tetap menjadi bagian utuh dari kurikulum pendidikan nasional Indonesia.

Meskipun PKn sudah lama diimplementasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tetapi tidak semua mengetahui dan memahami bagaimana perjalanan PKn sepanjang berdirinya Indonesia. Padahal dengan mengetahui sejarah PKn dalam kurikulum di Indonesia, pengambil kebijakan dapat menganalisis berbagai kelemahan sebelumnya (Octavia & Sumanto, 2018). Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan PKn dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, pengambil kebijakan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan di masa depan.

Oleh karena itu, dirasa penting untuk kembali menelusuri bagaimana sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya PKn. Atas dasar itu, judul yang diangkat dalam artikel ini adalah sejarah PKn dalam kurikulum di Indonesia.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Di sini

peneliti berusaha untuk menangkap fenomena yang muncul, yaitu tidak semua mengetahui dan memahami bagaimana perjalanan PKn sepanjang berdirinya Indonesia. Permasalahan yang ditemukan itulah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah yang berkaitan langsung dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dicoba untuk dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif (narasi). Teknis analisis yang dilakukan adalah dengan menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang disusul kemudian dengan analisis, namun tidak semata-mata menguraikan, melainkan bermaksud memberikan pemahaman dan penjelasan lebih komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Membahas tentang sejarah perjalanan PKn dalam kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia ini adalah sangat menarik. Hal ini tentunya begitu dinamis, seiring dengan terjadinya perubahan yang berdasarkan pada perkembangan kurikulum Indonesia (Santika, Suastra, et al., 2022). Namun karena sering kali berganti-gantinya kurikulum di Indonesia tentunya menimbulkan berbagai ungkapan dan tanggapan dari berbagai pihak (Wahyuni et al., 2022).

Bahkan muncul ungkapan yang sangat menggelitik, yang sering kali muncul seiring

dengan perubahan penguasa negeri ini yakni ‘ganti menteri ganti kurikulum (Santika, 2021a). Pernyataan itu bukanlah isapan jempol belaka. Karena nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, berulang kali kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan. Sejarah mencatat perubahan kurikulum pendidikan nasional terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 dan 2013. Kemudian muncul perubahan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum merdeka dengan platform merdeka belajar.

Munculnya perubahan terhadap kurikulum pendidikan nasional tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan keberadaannya, bahwa sistem kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan memang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat (Santika, Suarni, et al., 2022).

A. PKn dalam Kurikulum 1947.

Perlu diketahui, bahwa kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional (Buka et al., 2022). Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950.

Sebenarnya pada tahun 1947 tersebut, kurikulum lebih dikenal dengan *leer plan* (dalam bahasa Belanda) yang artinya “Rencana Pelajaran”. Suasana pendidikan yang diselenggarakan lebih berkaitan dengan upaya-upaya menjadi manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang sejajar dengan bangsa lain.

Lebih spesifik lagi, pada tahun 1947 ini kelompok kerja yang bertugas menyusun konsep pendidikan, telah merumuskan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional pada saat itu adalah untuk mendidik warga Negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan nasional pada masa itu menekankan pada penanaman semangat dan jiwa kepahlawanan (patriotisme) (Ruslan, 2017).

B. PKn dalam Kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai 1952.

Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, dimana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Landasan yuridis kurikulum 1952 tidak berbeda jauh dari kurikulum 1947. Landasan idilinya adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Landasan operasional kurikulum 1952 adalah UU No. 4 Tahun 1950. Undang-undang itu telah dirancang sebelum tahun 1950.

Kaitannya dengan PPKn, di kurun waktu berlakunya kurikulum ini, bahwa di tahun 1959/1960an ketika gegap gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan mata pelajaran Civics dalam dunia pendidikan Indonesia (Santika, 2022). Hal ini ditandai dengan adanya satu buku terbitan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) yang berjudul “Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru”, karangan Mr. Soepardo, dan kawan-kawan.

C. PKn dalam Kurikulum Rentjana Pendidikan 1964.

Pada tahun 1964 terjadi perubahan kurikulum. Pendidikan ideologi yang difokuskan pada Manipol-USDEK, Nasakom, dan semangat revolusi (Santika, 2020). Mata pelajaran Kewarganegaraan yang meliputi materi sejarah, ilmu bumi, dan kewargaan negara (nama baru civics) menjadi penting untuk mengembangkan pendidikan ideologi dan dimasukkan dalam struktur kurikulum dengan nama Perkembangan Moral (Respatiadi et al., 2022).

Kehidupan kebangsaan di bidang politik semakin didominasi oleh ideologi Manipol-USDEK yang dianggap sebagai manifestasi dari Pancasila. Pancasila bahkan kemudian diperas menjadi trisakti dan kemudian diperas lagi menjadi gotong royong. Nasakom (Nasional, Agama, Komunisme) menjadi jargon baru bersama-sama dengan revolusi yang tak pernah selesai. Pendidikan semakin dianggap penting untuk menanamkan jiwa revolusioner dan

Nasakom. Kurikulum harus berubah untuk lebih menghasilkan generasi revolusioner yang berjiwa Nasakom (Santika, Sujana, et al., 2019).

D. PKn dalam Kurikulum 1968.

Kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Pembuatan Kurikulum 1968 bertujuan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dibentuk oleh Orde Lama. Dalam Kurikulum 1968, pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia dengan ideologi Pancasila yang sehat secara jasmani maupun rohani serta memiliki kecerdasan dan keterampilan (Santika et al., 2018). Selain itu, Kurikulum 1968 juga dimaksudkan untuk meningkatkan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama para peserta didik (Raharjo, 2020).

Perkembangan berikutnya, mata pelajaran Civics yang kemudian diganti menjadi Kewargaan Negara pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak. Kajian Pendidikan Kewargaan Negara untuk masing-masing jenjang berbeda-beda kekompleksannya. Untuk jenjang sekolah dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi. Untuk jenjang SMP, Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program

pembelajaran isinya Sejarah Kebangsaan (30%), Kejadian setelah Indonesia merdeka (30%), dan UUD 1945 (40%). Untuk jenjang SMA, Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran sebagian besar terdiri atas UUD 1945

E. PKn dalam Kurikulum 1975.

Pada Kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 (Tarbiyah et al., 2018).

Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan.

Mata pelajaran PMP identik dengan pemerintahan Orde Baru. Kemudian mata pelajaran tersebut telah berganti nama menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”. Selanjutnya PMP mulai dipelajari di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975 (Khoirurrijal et al., 2022).

F. PKn dalam Kurikulum 1984.

Perubahan Kurikulum 1975 menjadi Kurikulum 1984 secara tidak langsung juga menimbulkan masalah bagi pelaksanaan kegiatan pengajaran PMP. Kekacauan ini timbul karena upaya Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu (1983-1985), yang bersikeras memasukkan pelajaran Pendidikan

Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) ke dalam Kurikulum 1984. Materi baru ala Nugroho ini menimbulkan kontroversi karena dinilai tumpang tindih dengan pelajaran Sejarah Nasional dan PMP (Santika, 2018). Setelah Nugroho wafat pada tahun 1985, kekacauan dalam mata pelajaran PMP baru diakui oleh Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. “Terus terang saya katakan, saat ini terjadi tumpang tindih antara P4, PSPB, PMP, dan Sejarah Nasional. Tumpang tindih tersebut akan mengakibatkan hilangnya waktu yang bisa dipakai untuk keperluan lain, atau mendesak mata pelajaran lain.

Beban yang ditanggung para murid sebagai dampak politik pendidikan kian bertambah. Mereka tak hanya wajib mempelajari PMP, tapi juga harus mengikuti penataran P4 yang ditetapkan sebagai kegiatan wajib oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1982. Dalam Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila (1982), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa “Hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran (Hadiansyah et al., 2019).”

G. PKn dalam Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999.

Kurikulum 1994 pada dasarnya dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kurikulum 1994 adalah merupakan: "Wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warganegara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Trisna, 2020).

Setelah kurikulum 1994 berjalan selama 5 tahun, direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 14 Juli 1999 menerbitkan Penyempurnaan Penyesuaian Kurikulum 1994 atau Suplemen GBPP. Hal ini dilakukan karena adanya tanggapan, kritik, dan saran dari praktisi, pakar, ahli, serta masyarakat terhadap kurikulum 1994. Tanggapan dan kritik tersebut pada umumnya berkenaan dengan padatnya isi kurikulum (Santika, 2017). Kepadatan isi kurikulum 1994 dapat dilihat pada banyaknya mata pelajaran dan juga substansi dari setiap mata pelajaran. Penyempurnaan yang lain adalah dalam hal materi yang kurang sesuai, baik dengan tahap perkembangan anak maupun dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan iptek. Kurikulum yang berlaku dianggap kurang mengakomodasi keragaman potensi peserta didik, aspirasi dan peran serta masyarakat.

H. PKn dalam Kurikulum 2004.

Pada tahun 2004, yaitu berlakunya

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBP) muncul paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral /filsafat Pancasila dan memiliki visi yang kuat *nation and character building, citizen empowerment* (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan *civil society* (masyarakat kewargaan) (Khatimah et al., 2022). Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKn (PPKn), yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim (hegemoni penguasa), memiliki visi untuk memperkuat state building (negara otoriter birokratis; kooptasi negara) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau obyek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa (Masyhud, 2014).

Akibat dari kondisi ini, PKn semakin sulit untuk mengembangkan karakter warga negara yang demokratis, sehingga menjadi lahan subur bagi berkembangnya otoriterisme. PKn paradigma baru ini sering dikenal sebagai PKn yang bermutu (Santika, 2021c). Dikatakan PKn yang bermutu karena memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat demokratis, memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang

mampu untuk mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara dan masyarakat kewargaan. PKn yang bermutu inilah merupakan jati diri PKn. PKn yang bermutu juga sesungguhnya telah mengandung di dalamnya pemenuhan kebutuhan tuntutan dalam KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) atau Kurikulum 2004

I. PKn dalam Kurikulum 2006.

Pada tahun 2006 dibentuklah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dikenal dengan sebutan KTSP. Perubahan kurikulum ini dilakukan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP sudah disesuaikan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Dengan menggunakan Kurikulum 2004, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan Standar Isi (Permen No 22 Tahun 2006) dan Standar Kompetensi (Permen Nomor 23 Tahun 2006), serta Standar Kompetensi Lulusan (Permen Nomor 23 Tahun 2006) yang menjadi acuan utama bagi setiap satuan pendidikan dalam menyusun KTSP (Sari, 2022). Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Khoirurrijal et al., 2022).

J. PKn dalam Kurikulum 2013 dan 2013 Revisi

Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan Kurikulum 2013. Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn (Abdullah, 2007), dengan rincian sebagai berikut.

1. Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
2. Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan.
3. Mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan kewarganegaraan; (2) sikap kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan kewarganegaraan; (5) komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan.
5. Mengembangkan dan menerapkan

berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh.

6. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.

K. PKn dalam Kurikulum 2020 (Kurikulum Merdeka).

Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya tiga poin utama dalam gagasan merdeka belajar, yaitu teknologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila (Satria et al., 2022). Tentu saja, poin pertama terkait dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun ada hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, utamanya terkait dengan PPKn, bahwa adanya penguatan keberagaman sebagai esensi, berupa “keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler” (Kemenristekdikti, 2022).

Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi bila menggunakan konteks lokal. “Setiap murid akan melihat semua mata pelajaran dan semua materi dalam konteks”. Kemudian terkait dengan Profil Pelajar Pancasila,

Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai Profil Pelajar Pancasila (Setiyaningsih & Wiryanto, 2022). Adapun enam profil tersebut adalah pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Ketiga, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya (Marisa, 2021).

IV. SIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa Namun secara real, PKn di berbagai masa perjalanan bangsa ini dalam pelaksanaannya rentan sekali terhadap bias politik penguasa (*the rolling class*). Implementasi PKn tiada bedanya dengan instrumen penguasa yang justru merusak pembangunan watak manusia Indonesia yang berdasarkan konstitusi. Dalam perjalanannya perubahan nama yang sering kali berganti-ganti seiring dengan pergantian rezim mengindikasikan secara kuat bahwa kepentingan penguasa tidak mungkin bisa lepas dari PKn. Bukan hanya dalam segi penamaan dari civics education yang mengalami tekanan perubahan dari rezim, melainkan isi (*content*) dari PKn

sering kali “disusupi” dengan nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui PKn.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdullah, A. (2007). Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13, 343.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/354-Article Text-1134-1-10-20160929.pdf
- Batubara, A., & Darmawan, C. (2017). Demokrasi Pada Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Inovasi Media Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 81–84.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana 'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109–117.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40757>
- Hadiansyah, R. R., Pradana, R. Y., & Mustiningsih. (2019). Dinamika Perubahan Kurikulum di Indonesia. *Seminar Nasional - Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 259–264.
- Kapoh, R. J., Pattiasina, P. J., Rutumalessy, M., Wariunsora, M., Tabelessy, N., & Santika, I. G. N. (2023). Analyzing the Teacher ' s Central Role in Effort to Realize Quality Character Education. *Journal of Education Research*, 6(1), 452–459.
<https://doi.org/10.37985/jer.v4i2.176>
- Kemenristekdikti. (2022). *Kebijakan Kurikulum Merdeka* (pp. 1–15). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Kebijakan_Kurikulum_Merdeka.pdf
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127–132.
<https://doi.org/10.46650/wa.13.2.1266.127-132>
- Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Makrufi, D. A., Gandi, S., Muin, A., Tajeri, Fakhrudin, A., Hamdani, & Suprapno. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Marisa, M. (2021). Curriculum Innovation “Independent Learning ” In The Era Of Society 5 . 0. *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 66–78.
<https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>
- Masyhud. (2014). Perubahan kurikulum di indonesia : studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, IV(1), 49–70.
- Nurdin, E. S. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Sosiohumanika*, 9(1), 11–30.
<http://www.journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/view/654>
- Octavia, E., & Sumanto, I. (2018). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 20–30.
<http://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/20-30>
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63.
<https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Respatiadi, F., Zid, M., & Hotimah, O. (2022). Komparasi Kurikulum 1964 Dan 1968 Serta Kajian Materi Geografi Pada Jenjang Smp. *EDUSAINTER: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 9(1), 278–290.
<https://doi.org/10.47668/edusaintek.v9i1.450>
- Ruslan, I. (2017). ‘Membangun’ Nasionalisme Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Konflik Sara Di Indonesia. *Jurnal Tapis*, 10(1), 85–102.
<https://doi.org/10.24042/TAPIS.V10I1.1513>

- Santika, I. G. N. (2017). Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Widya Accarya*, 7(1). <http://103.39.12.42/index.php/widyaaccarya/article/view/898>
- Santika, I. G. N. (2018). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui Pendidikan Karakter Berbasiskan Kepedulian Lingkungan Untuk Membebaskannya Dari Bencana Banjir. *Widya Accarya*, 9(1).
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021a). Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 369–377.
- Santika, I. G. N. (2021b). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021c). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, XVI(2), 5–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25078/vd.v16i2.2384>
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual. In *CV. Global Aksara Pers* (Issue 1). Global Aksara Pers.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Wahyuni, N. W. R. (2019). Pendidikan karakter: studi kasus peranan keluarga terhadap pembentukan karakter anak Ibu Sunah di Tanjung Benoa. *Widya Accarya*, 10(1).
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2018). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No. 79 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 79, 981–990.
- Santika, I. G. N., Suarni, N. K., & Lasmawan, I. W. (2022). Analisis Perubahan Kurikulum Ditinjau Dari Kurikulum Sebagai Suatu Ide. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 694–700. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3690>
- Santika, I. G. N., Suastra, I. W., & Arnyana, I. B. P. (2022). Membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar melalui pembelajaran ipa. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 207–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3382>
- Santika, I. G. N., & Sudiana, I. N. (2021). Insersi Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Ditinjau dari Perspektif Teoretis. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 11(4), 464–472. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jjpb.v11i4.42052>
- Santika, I. G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *Journal of Etika Demokrasi (JED)*, 4(2), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391>
- Sari, E. C. (2022). Kurikulum Di Indonesia : Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan. *Inculco Journal of Christian Education*, 2(2), 93–109.
- Satria, R., Adiprima, P., Wulan, K. S., & Harjatanaya, T. Y. (2022). Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. In *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan*.
- Setyaningsih, S., & Wiryanto, W. (2022). Peran Guru Sebagai Aplikator Profil Pelajar Pancasila Dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(4), 2656–5862. <https://doi.org/10.36312/jime.v8i4.4095/http>
- Tarbiyah, F. I., Syarat, M., Gelar, M., Pendidikan, S., & Oleh, D. (2018). *Analisis peran guru pkn dalam membentuk karakter siswa di mi al-hidayah lestari skripsi*. 3.
- Trisna, A. (2020). Penguatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui

Digitalisasi Media Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 31–41.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/9304/6759>

Wahyuni, N. P. S. W., Widiastuti, N. L. G. K., & Santika, I. G. N. (2022). IMPLEMENTASI METODE EXAMPLES NON EXAMPLES DALAM PEMBELAJARAN DARING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 9(1), 50–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38048/jipcb.v9i1.633>